

PEMUTAKHIRAN PETA DASAR PENDAFTARAN TANAH KE DIGITAL TERKAIT SERTIFIKAT GANDA DI INDONESIA

ABSTRAK

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap telah mengatur tentang perolehan tanah dan, tetapi permasalahan sengketa tanah masih saja menimbulkan sertifikat ganda . Penulis meneliti dengan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan kasus mengkaji penerapan hukum ditengah masyarakat dengan pendekatan perundang-undangan dan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder untuk selanjutnya dianalisis. Penelitian ini berfokus pada pemutakhiran Peta Dasar Pendaftaran tanah yang seharusnya dipertegas dalam peraturan agar dapat menghindari permasalahan tumpang tindih dan sertifikat ganda pada contoh Putusan Nomor : 062/G/2014/PTUN.SMG. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah pemutakhiran terhadap Peta Dasar Pendaftaran Tanah harus dilakukan dan dibentuk peraturan terlebih dahulu , untuk mendukung perubahan dari peraturan yang dibentuk pemerintah dalam permasalahan Sertifikat Ganda.

Kata Kunci : Peta Dasar Pendaftaran Tanah , Pemutakhiran Peta Dasar Pendaftaran Tanah, Sertifikat Ganda , Sengketa Tumpang Tindih Surat Tanah.

UPDATE OF LAND REGISTRATION BASE MAP TO DIGITAL RELATED TO MULTIPLE CERTIFICATES IN INDONESIA

ABSTRAC

Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 12 of 2017 concerning Acceleration of Complete Systematic Land Registration has regulated land ownership and, however, land disputes still result in multiple certificates. The author uses a normative juridical research method and uses a legal study approach in the community with an approach to legislation and collects primary and secondary data for further analysis. This research focuses on updating the Basic Map of Land Registration which should be emphasized in the regulations in order to avoid overlapping problems and duplicate certificates in the example of Decision Number: 062/G/2014/PTUN.SMG. The conclusion that can be drawn from the results of this research is that the updating of the Basic Land Registration Map must be carried out and formed first, to

support changes to the regulations established by the government in the issue of Dual Certificates.

Key Word : Land Registration Base Map, Updating of Land Registration Base Map, Multiple Certificates, Land Certificate Overlap Disputes.